



# **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**



## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**

### **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

## KATA PENGANTAR

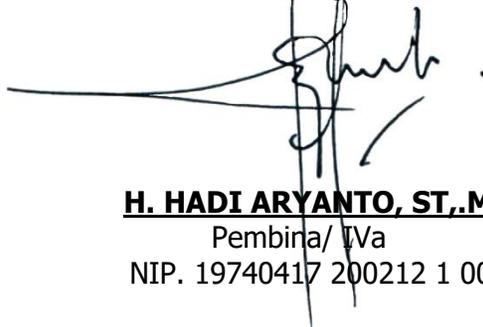
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan acuan perencanaan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019\ serta Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Penyusunan Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019.

Harapan kami semoga Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tideng Pale, 26 Maret 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**



**H. HADI ARYANTO, ST., MT**

Pembina/ IVa

NIP. 19740417 200212 1 003

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| Kata Pengantar.....  | i     |
| Daftar Isi.....  | ii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |       |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1-2   |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 2-3   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 3     |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 3-4   |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA</b>  |       |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I<br>Tahun 2018 dan Capaian Renstra..... | 5-13  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 14    |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                                       | 15    |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>   |       |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....  | 16-21 |
| 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018.....  | 21-27 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |       |
| Penutup.....   | 28    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah 5 (lima) tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja (Renja) OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja OPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja OPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**



Maksud disusunnya Renja OPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan disusunnya Renja OPD adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, sistematika Renja OPD disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Renja Tahun 2018.

##### **BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I**

##### **Tahun 2018**

Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan s.d. triwulan I Tahun 2018 dan hambatan atau kendala yang dihadapi pada bagian Perekonomian dan Pembangunan.

##### **BAB III. Tujuan, sasaran, dan Rencana Program dan Kegiatan Renja 2019**

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2019.

##### **BAB IV. Penutup**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

## **BAB II**



## **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2018 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Bagian Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan. Adapun fungsi bagian Perekonomian dan Pembangunan, yaitu ;

- a. Penyiapan rumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pembinaan dan pemberian bimbingan penyelenggaraan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan;
  - b. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIMPPD;
  - c. Terfasilitasinya dan terlayannya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE);
  - d. Rapat-rapat koordinasi bidang administrasi ekonomi dan pembangunan;
2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja :
  - a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran;
  - b. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
  - c. Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional;
  - d. Tersusunnya dokumen Renja PD;
  - e. Tersusunnya dokumen Renstra PD;
  - f. Peningkatan kapasitas aparatur bidang pengadaan barang dan jasa;
  - g. Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.



- h. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD).

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2018, yang terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 0 % dan realisasi keuangan sebesar 0 %. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan disebabkan keterlambatan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta perubahan jadwal kegiatan.

**Tabel 1** : Realisasi kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

| NO.           | URAIAN  | PAGU DANA<br>(Rp) | REAL<br>KEUANGAN | REAL FISIK<br>(%) |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|               |   |                   | Rp.              | FISIK             |
| 1             | 2   | 3                 | 5                | 7                 |
| 1             | Portal Informasi Berbasis Web   | 107.000.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 2             | Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah                     | 126.400.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 3             | Penyediaan jasa surat menyurat  | 1.200.000,00      | 0,00             | 0,00              |
| 4             | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 120.138.750,00    | 0,00             | 0,00              |
| 5             | Penyediaan alat tulis kantor  | 28.905.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 6             | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | 6.000.000,00      | 0,00             | 0,00              |
| 7             | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | 27.000.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 8             | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 400.000.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 9             | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah    | 80.500.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 10            | Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran                                       | 14.400.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 11            | Infrastruktur LPSE  | 361.300.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 12            | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | 27.000.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 13            | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | 2.800.000,00      | 0,00             | 0,00              |
| 14            | Pendidikan dan pelatihan formal   | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 15            | Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL)                                    | 57.600.000,00     | 0,00             | 0,00              |
| 16            | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 408.500.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 17            | Unit Layanan Pengadaan (ULP)  | 420.976.250,00    | 0,00             | 0,00              |
| 18            | Penyusunan dan pengumpulan data statistik Daerah                                | 210.280.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| <b>JUMLAH</b> |   | 2.500.000.000,00  | 0,00             | 0,00              |

Dari 17 kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikelompokkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

- Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 0 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 0 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 18 kegiatan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bagian Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan tahun triwulan I tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran Tabel berikut :



**Tabel 2 : REKAPITULASI Hasil EVALUASI PELAKSANAAN RENJA EKOBANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

| KODE                  | SASARAN  | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)        | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2016-2021 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |   |                                       | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019 |                                       |
|-----------------------|--|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
|                       |  |  |  |  |   | TARGET RENJA TAHUN 2018                                      | REALISASI RENJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2018 | REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |  | REALISASI RENJA S/D TAHUN 2019   | REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |
| 1                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9=(8/7)                               | 10   | 11=(6+8+10)  | 12=(11/5)                             |
| <b>4.01.4.01.3.01</b> | <b>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b> |  |   |  |   |                                       |  |  |                                       |
| 4.01.4.01.3.01.01     |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah penggunaan materai  | 3100 lembar  | 1000 lembar   | 500 lembar   | 200 lembar                                | 40                                    | 500 lembar                                     | 1300 lembar  | 41.94                                 |
| 4.01.4.01.3.01.06     |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah STNK mobil dinas yang diperpanjang                        | 6 STNK   | 1 STNK  | 1 STNK   | 0   | 0                                     | 1 STNK   | 3 STNK   | 50.00                                 |
| 4.01.4.01.3.01.07     |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah tenaga administrasi keuangan                              | 96 orang   | 27 orang  | 16 orang   | 0   | 0.00                                  | 16 orang                                       | 43 orang   | 44.79                                 |
|                       |  |  | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan PPTK                         | 12 laporan   | 2 laporan   | 2 laporan  | 0   | 0.00                                  | 2 laporan                                      | 2 laporan  | 16.67                                 |
|                       |  |  | Frekuensi pertemuan/ rapat kerja tenaga                          | 36 kali  | 7 kali  | 6 kali   | 0   | 0.00                                  | 6 kali   | 7 kali   | 19.44                                 |
| 4.01.4.01.3.01.10     |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)                             | 240 jenis  | 78 jenis  | 40 jenis   | 30 jenis                                  | 75                                    | 40 jenis                                       | 108 jenis  | 45.00                                 |



|                       |  |  |  |           |           |           |         |       |           |           |       |
|-----------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
|                       |  | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah pengadaan peralatan operasional kantor  | 3 Unit    | 1 unit    | 1 unit    | 0       | 0.00  | 1 unit    | 2 unit    | 66.67 |
| 4.01.4.01.3.01.11     |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah pengadaan/cetak spanduk   | 95 lembar | 23 lembar | 20 lembar | 0       | 0     | 20 lembar | 51 lembar | 53.68 |
| 4.01.4.01.3.01.18     |  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                         | Jumlah rapat-rapat koordinasi atau kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh aparatur | 420 keg   | 58 keg    | 70 keg    | 23 keg  | 32.86 | 70 keg    | 167 keg   | 39.76 |
| 4.01.4.01.3.01.19     |  | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam daerah yang diikuti oleh aparatur               | 300 kali  | 48 kali   | 50 kali   | 7 kali  | 14.00 | 50 kali   | 113 kali  | 37.67 |
|                       |  | Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran                                    | Jumlah Tenaga Kontrak  | 15 Orang  | 1 Orang   | 3 Orang   | 2 Orang | 66.67 | 3 Orang   | 9 Orang   | 60.00 |
| <b>4.01.4.01.3.02</b> | <b>Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang efektif dan efisien</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                     | <b>Prosentase peningkatan pelayanan publik Bagian</b>  |           |           |           |         |       |           |           |       |
| 4.01.4.01.3.02.11     |  | Infrastruktur LPSE   | Jumlah tenaga pelaksana Tim LPSE   | 114 Orang | 35 orang  | 16 orang  | 0       | 0     | 19 orang  | 54 orang  | 47.37 |
|                       |  |  | Jumlah panitia pelaksana kegiatan pelatihan Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa           | 13 orang  | 13 orang  | 13 orang  | 0       | 0     | 0         | 13 orang  | 100   |
|                       |  |  | Jumlah kapasitas jaringan/ koneksi internet LPSE   | 8 Mbps    | 6 Mbps    | 6 Mbps    | 6 Mbps  | 100   | 6 Mbps    | 6 Mbps    | 75.00 |



|                       |  |   |   |            |           |           |        |       |           |            |       |
|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|------------|-------|
|                       |  |   | Jumlah pelatihan Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa                       | 2 Kali     | 1 Kali    | 1 Kali    | 0      | 0     | 1 Kali    | 2 Kali     | 100   |
| 4.01.4.01.3.02.24     |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | Frekuensi service kendaraan operasional kantor                                | 24 kali    | 2 kali    | 4 kali    | 1 kali | 25.00 | 4 kali    | 7 kali     | 29.17 |
|                       |  |   | Jumlah pemeliharaan suku cadang kendaraan operasional kantor                  | 25 jenis   | 6 jenis   | 6 jenis   | 0      | 0.00  | 8 jenis   | 14 jenis   | 56.00 |
|                       |  |   | Jumlah bahan bakar/ pelumas yang digunakan                                    | 4050 liter | 300 liter | 960 liter | 0      | 0.00  | 960 liter | 1260 liter | 31.11 |
| 4.01.4.01.3.02.28     |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor        | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor  | 12 unit    | 1 unit    | 4 unit    | 0      | 0.00  | 2 unit    | 3 unit     | 25.00 |
|                       |  |   | Jumlah pemeliharaan aset tetap kantor (server web SIMPPD)                     | 5 Kali     | 1 kali    | 1 kali    | 0      | 0.00  | 1 kali    | 2 kali     | 40.00 |
| 4.01.4.01.3.          |  | Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu               | Jumlah penyediaan pakaian sipil harian aparatur                               | 108 set    | 0         | 24 set    | 0      | 0.00  | 25 set    | 25 set     | 23.15 |
| <b>4.01.4.01.3.05</b> | <b>Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>Prosentase aparatur memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa</b> |            |           |           |        |       |           |            |       |
| 4.01.4.01.3.05.01     |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                           | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis barang dan jasa               | 72 orang   | 15 orang  | 8 orang   | 0      | 0.00  | 12 orang  | 27 orang   | 37.50 |



| 4.01.4.01.3.06 | Tersedianya sistem pelaporan yang akurat, cepat, serta akuntabel | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |           |          |          |   |      |          |          |       |
|----------------|--|---|--|-----------|----------|----------|---|------|----------|----------|-------|
|                |  | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah personil Tim monitoring percepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung  | 162 orang | 54 orang | 27 orang | 0 | 0    | 27 orang | 81 orang | 50.00 |
|                |  |   | Frekuensi kegiatan rapat atau pertemuan Tim Monitoring   | 24 kali   | 4 kali   | 4 kali   | 0 | 0.00 | 4 kali   | 8 kali   | 33.33 |
|                |  |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD) | 5 kali    | 2 kali   | 1 kali   | 0 | 0    | 1 Kali   | 2 Kali   | 40.00 |
|                |  |   | Jumlah kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti aparat  | 162 kali  | 13 kali  | 30 kali  | 0 | 0.00 | 27 kali  | 40 kali  | 24.69 |
|                |  |   | Frekuensi kunjungan atau monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung                   | 648 kali  | 20 kali  | 108 kali | 0 | 0.00 | 108 kali | 128 kali | 19.75 |



|   |   |  |   |           |          |          |      |          |          |          |       |
|---|---|--|---|-----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-------|
|   |   |  | Terlaksananya peningkatan (upgrading) Web SIMPPD                          | 3 kali    | 0        | 1 kali   | 0    | 0.00     | 1 kali   | 1 kali   | 33.33 |
|   |   |  | Tersedianya sarana prasarana penunjang sistem & Hosting web SIMPPD        | 60 bulan  | 12 bulan | 12 bulan | 0    | 0        | 12 bulan | 24 bulan | 40.00 |
| 4.01.4.01.3.06.06   | Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD  | RAKORDAL   | Frekuensi pelaksanaan kegiatan RAKORDAL                                   | 12 kali   | 3 kali   | 2 kali   | 0    | 0        | 2 kali   | 5 kali   | 41.67 |
| <b>4.01.4.01.3.31</b>   | <b>Peningkatan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (LPSE).</b> | <b>Program Pendukung Administrasi Pemerintahan</b>   | <b>Prosentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b> |           |          |          |      |          |          |          |       |
| 4.01.4.01.3.31.03   |   | Unit Layanan Pengadaan (ULP)                         | Jumlah personil/panitia pengadaan barang dan jasa (ULP)                   | 144 orang | 46 orang | 24 orang | 0    | 0.00     | 24 orang | 90 orang | 62.50 |
| Jumlah penggunaan ATK (Jenis)   |   |  | 120 jenis   | 18 jenis  | 20 jenis | 0        | 0.00 | 20 jenis | 48 jenis | 40.00    |       |
| Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh Tim ULP |   |  | 288 kali  | 69 kali   | 48 kali  | 0        | 0    | 24 kali  | 93 kali  | 32.29    |       |
| <b>4.01.4.01.3.15</b>   | <b>Stabilitas harga barang dan jasa didaerah</b>  | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>           | <b>Terlaksananya kegiatan penyusunan buku Indeks Harga Konsumen (IHK)</b> |           |          |          |      |          |          |          |       |
| 4.01.4.01.3.15.06   |   | Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah | Jumlah tenaga penyusun indeks   | 180 orang | 53 orang | 30 orang | 0    | 0.00     | 30 orang | 85 orang | 47.22 |



|                       |   |   |  |              |             |             |        |      |             |             |       |
|-----------------------|---|---|--|--------------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|-------|
|                       |   |   | harga konsumen/<br>IHK   |              |             |             |        |      |             |             |       |
|                       |   |   | Jumlah kegiatan rapat kerja tim penyusun IHK   | 12 kali      | 1 kali      | 2 kali      | 0      | 0    | 2 kali      | 3 kali      | 25.00 |
|                       |   |   | Jumlah buku atau laporan IHK   | 1584 laporan | 264 laporan | 264 laporan | 0      | 0    | 264 laporan | 528 laporan | 33.33 |
|                       |   |   | Jumlah Kunjungan atau monitoring ke pusat-pusat ekonomi masyarakat                       | 18 kali      | 3 kali      | 3 kali      | 1 kali | 0.00 | 3 kali      | 7 kali      | 38.89 |
| <b>4.01.4.01.3.15</b> | <b>Stabilitas harga barang dan jasa didaerah</b>  | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b> | <b>Tersusunnya laporan Inflasi Kabupaten Tana Tidung</b>                                 |              |             |             |        |      |             |             |       |
| 4.01.4.01.3.15.02     |   | Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah | Jumlah personil pelaksana atau Tim Pengendali inflasi daerah (TPID)                      | 138 orang    | 43 orang    | 23 orang    | 0      | 0.00 | 23 orang    | 66 orang    | 49.62 |
|                       |   |   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan TPID   | 6 laporan    | 0           | 1 laporan   | 0      | 0    | 1 laporan   | 1 laporan   | 16.67 |
|                       |   |   | Frekuensi rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)                          | 12 kali      | 0           | 2 kali      | 0      | 0    | 2 kali      | 2 kali      | 16.67 |
| <b>4.01.4.01.3.</b>   | <b>Peningkatan kualitas sistem pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengendalian pembangunan.</b> | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b> | <b>Terlaksananya sistem pengendalian pembangunan berbasis elektronik</b>                 |              |             |             |        |      |             |             |       |
| 4.01.4.01.3.          |   | Portal Informasi Berbasis Web                               | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian | 6 Kali       | 2 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali | 100  | 1 Kali      | 3 Kali      | 50.00 |



|  |  |  |          |          |          |        |     |          |          |       |
|--|--|--|----------|----------|----------|--------|-----|----------|----------|-------|
|  |  | pembangunan daerah (SIMPPD)                      |          |          |          |        |     |          |          |       |
|  |  | Terlaksananya peningkatan (upgrading) Web SIMPPD | 3 Kali   | 0        | 1 Kali   | 1 Kali | 100 | 1 Kali   | 2 Kali   | 6.67  |
|  |  | Tersedianya layanan hosting perangkat SIMPPD     | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 0      | 0   | 12 Bulan | 24 Bulan | 40.00 |



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja di bagian Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan dokumen renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta mengacu pada hasil output program kegiatan.

**Tabel 3** : Capaian kinerja bagian Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2018 :

| NO. | INDIKATOR KINERJA   | TARGET<br>(%) |      |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN<br>(%) |      |      | PROYEKSI<br>CAPAIAN<br>(%) | CATATAN ANALISIS |
|-----|---|---------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|----------------------------|------------------|
|     |   | 2016          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                     | 2017 | 2018 | 2019                       |                  |
| 1   | Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD  | 95            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 93                       | 98   |      | 100                        |                  |
| 2   | Jumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggarannya diatas 80%   | 90            | 95   | 95   | 97   | 98   | 100  | 86                       | 93   |      | 97                         |                  |
| 3   | Jumlah OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu                               | 95            | 96   | 100  | 100  | 100  | 100  | 88                       | 100  |      | 100                        |                  |
| 4   | Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE  | 95            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 95                       | 100  |      | 100                        |                  |
| 5   | Jumlah pengguna (Penyedia) layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Tidung | 92            | 95   | 100  | 100  | 100  | 100  | 92                       | 92   |      | 100                        |                  |
| 6   | Jumlah Aparatur Bagian Perekonomian & Pembangunan yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa   | 80            | 70   | 85   | 90   | 95   | 100  | 80                       | 50   |      | 90                         |                  |
| 7   | Persentase Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Tana Tidung  | 95            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 95                       | 100  |      | 100                        |                  |



### **2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan**

Sampai dengan triwulan I Tahun 2018 tingkat kinerja program dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan hampir seluruhnya memuaskan, artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah :

1. Perangkat Daerah kurang tertib dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD).
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan (Perbup pengendalian pembangunan) belum maksimal dikarenakan masih banyak PD belum melaksanakan sesuai petunjuk yang diatur didalamnya.
3. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa belum maksimal.
4. Masih banyak aparatur sipil Negara belum memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2018 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2016-2021. Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD, yaitu adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yaitu :

1. Menertibkan OPD dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan sesuai dengan kenyataan;
2. Pemanfaatan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis IT atau secara elektronik, guna mengefektifkan proses pemantauan dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan profesionalisme Tim ULP agar proses pengadaan barang dan jasa berlangsung akuntabel dan optimal agar pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi dengan cepat.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**RENJA 2019**

**3.1. Tujuan Dan Sasaran**

**a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengoptimalkan pencapaian target Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung maka Renja perlu dirumuskan kembali. Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.
- c. Meningkatnya sistem informasi pembangunan yang transparan.
- d. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

**b. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur.

**Tabel 4 : MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

| <b>NO.</b> | <b>ISU STRATEGIS</b>   | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>  | <b>KEBIJAKAN</b>   |
|------------|--|---|--|---|--|--|
| 1          | Masih lemahnya kualitas pengelolaan administrasi pembangunan daerah  | Meningkatkan kualitas sistem informasi pembangunan dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan pembangunan | Tersedianya sistem pelaporan yang akurat, cepat, serta akuntabel | Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang diserahkan/ disampaikan oleh setiap SKPD | Optimalisasi penggunaan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis elektronik              | <p>Penyusunan laporan capaian/ realisasi fisik dan keuangan SKPD secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p> <p>Melaksanakan proses peningkatan kapabilitas SKPD dalam menyusun pelaporan realisasi fisik dan keuangan</p> <p>Efektivitas pelaksanaan koordinasi serta fasilitasi peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian Pembangunan Daerah</p> <p>Melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD</p> |
| 2          | Rendahnya tingkat kinerja pelaksanaan anggaran setiap SKPD yang berdampak langsung terhadap penyerapan APBD daerah | Tercapainya tingkat efisiensi dan efektifitas serapan anggaran pembangunan daerah   | Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD           | Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD                                  | Mengembangkan proses monitoring dan pengendalian internal pelaksanaan anggaran setiap SKPD | Melaksanakan pemantauan secara intensif terhadap progres serapan anggaran setiap SKPD  |



|   |  |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|--|---|
|   |  |   |   |  |  | Meningkatkan koordinasi secara komprehensif baik yang berkaitan peraturan daerah maupun isu-isu strategis yang dihadapi daerah                            |
|   |  |   |   |  |  | Melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD secara periodik melalui rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah   |
| 3 | Menurunnya kepercayaan publik dala proses pengadaan barang dan jasa pemerintah | Mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang prima dan akuntabel | Peningkatan pelayanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) | Jumlah penyedia barang dan jasa yang mendaftarkan perusahaannya sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah melalui LPSE | Memaksimalkan pelayanan LPSE serta sarana prasaran penunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (E-Procurement) | Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur khususnya Tim LPSE sebagai langkah peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tupoksinya |
|   |  |   |   |  |  | Melakukan upgrading kapasitas jaringan/koneksi internet LPSE  |
|   |  |   |   |  |  | Meningkatkan pengetahuan penyedia barang dan jasa berkaitan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE  |



|   |  |   |  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|
|   |  | Mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang prima dan akuntabel | Peningkatan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (LPSE). | Presentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (E-Procurement) | Meningkatkan kinerja atau profesionalisme aparat/ Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai salah satu instrumen keberhasilan pembangunan daerah | Meningkatkan kapasitas serta profesionalisme Tim ULP dalam melaksanakan setiap proses pelelangan barang dan jasa  |
| 4 | Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan rutin | Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin                              | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan                              | Persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan    | Meningkatkan kualitas administrasi serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi  | <p>Memaksimalkan kegiatan surat menyurat sebagai salah satu upaya meningkatkan koordinasi antar SKPD</p> <p>Melakukan inventarisasi secara terukur terhadap segala kebutuhan pengadministrasian baik kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya periodik</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan serta pengawasan pelaksanaan setiap kegiatan organisasi</p> <p>Melaksanakan koordinasi serta konsultasi guna meningkatkan kinerja serta pelayanan baik internal maupun eksternal</p> |



|   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
|   |  |  |  |   |  | Melaksanakan koordinasi secara intensif guna fasilitasi mekanisme pengadaan barang dan jasa serta tata cara pengendalian pembangunan sebagai upaya meningkatkan realisasi anggaran setiap SKPD |
|   |  | Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien   | Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang efektif dan efisien | Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan  | Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah                     | Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset kantor yang perlu diperbaiki serta menentuka skala prioritasnya   |
|   |  |  |  |   |  | Melaksanakan pengadaan aset yang diperlukan berdasarkan urgensi kebutuhannya, serta dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi   |
| 5 | Masih kurangnya aparatur yang memiliki sertifikat kelulusan ahli pengadaan barang dan jasa | Meningkatkan kompetensi, profesionalisme serta akuntabilitas sumber daya aparatur  | Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah                        | Jumlah aparatur yang belum memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa | Merevitalisasi peran organisasi sebagai lembaga strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa | Memberikan kesempatan bagi aparatur/ PNS yang belum memiliki sertifikat untuk mengikuti kegiatan atau ujian keahlian barang dan jasa   |
| 6 | Belum tersedianya regulasi tentang pengendalian inflasi di daerah                          | Merumuskan kebijakan pengendalian harga serta distribusi barang dan jasa guna menjaga implikasi negatif dari inflasi terhadap ekonomi masyarakat di daerah | Stabilitas harga barang dan jasa di daerah                                       | Tingkat Indeks harga konsumen   | Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)                             | Melakukan koordniasi dengan instansi ataupun lembaga terkait baik di daerah maupun luar daerah guna merumuskan kebijakan serta langkah-langkah penanganan inflasi di daerah                    |



|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Melakukan pengumpulan data atau bahan guna penyusunan laporan indeks harga konsumen (IHK) yang nantinya dapat digunakan sebagai alat merumuskan suatu kebijakan |
|--|--|--|--|--|--|---|



### 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut ini :

| NO. | KEGIATAN   | MASUKAN                      | KELUARAN   | HASIL  | MANFAAT   |
|-----|--|------------------------------|--|--|---|
| 1.  | Penyediaan jasa surat menyurat                       | Dana sebesar Rp. 4.000.000   | Jumlah penyediaan materai 6.000                          | Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran                                      | Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan |
| 2.  | Penyediaan administrasi keuangan                     | Dana sebesar Rp. 251.787.000 | Jumlah tenaga administrasi keuangan                      | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara teknis dan administratif                     | Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan              |
| 3.  | Penyediaan alat tulis kantor                         | Dana sebesar Rp. 42.365.000  | Jumlah jenis ATK   | Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas rutin administratif kantor                             | Persebtase efektifitas pelaksanaan tugas-tugas rutin administratif perkantoran  |
| 4.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan            | Dana sebesar Rp. 7.000.000   | Jumlah penyediaan spanduk                                | Terpenuhinya sarana dan prasarana rutin pendukung penyelenggaraan hari-hari penting pemerintah | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                        |
| 5.  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor         | Dana sebesar Rp. 27.000.000  | Jumlah penyediaan CCTV & Fingger Lock Pintu Ruang Server | Terciptanya standar keamanan sarana & prasarana LPSE   | Persentase peningkatan mutu layanan pengadaan barang & jasa pemerintah          |
| 6.  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dana sebesar Rp. 500.000.000 | Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan-kegiatan         | Terlaksananya kegiatan-kegiatan  | Persentase penigkatan kualitas penyelenggaraan                                  |



|     |   |                              |   |  |   |
|-----|---|------------------------------|---|--|---|
|     |   |                              | kedinasan luar daerah   | kedinasan luar daerah  | pemerintahan daerah (good governance)   |
| 7.  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, pembinaan & pengawasan ke dalam daerah | Dana sebesar Rp. 200.000.000 | 1)Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam daerah. 2) Frekuensi pelaksanaan monitoringkegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD | Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan dalam daerah   | Persentase peningkatan intensitas pengawasan, pengendalian, serta pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang besumber dari dana APBD |
| 8.  | Penunjang urusan administrasi pemerintahan                                    | Dana sebesar Rp. 57.600.000  | Jumlah tenaga kontrak   | Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran   | Persentas peningkatan kualitas penyelenggaraan perkantoran  |
| 9.  | Infrastruktur LPSE  | Dana sebesar Rp. 704.500.000 | 1) Jumlah personil Tim LPSE. 2)Jumlah kapasitas bandwith internet LPSE. 3)Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek LPSE.                                 | 1) Terlaksananya proses pengadaan barang & jasa secara eletronik (e-procurement). 2)persentase fasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dialami para pengguna (user) system pengadaan secara elektronik (SPSE) | Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi LPSE  |
| 10. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                        | Dana sebesar Rp. 38.000.000  | 1)Frekuensi perawatan/service kendaraan mobil dinas kantor. 2)jumlah bahan bakar yang digunakan mobil dinas kantor                                    | 1)Terlaksnanya tugas-tugas kedinasan. 2)Terpenuhinya sarana mobilitas dalam rangka tugas-tugas rutin kantor  | Tercapainya pengelolaan sarana & prasarana kantor yang efektif dan efisien  |
| 11. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                            | Dana sebesar Rp. 35.000.000  | Jumlah perbaikan peralatan kantor   | Persentase pelaksanaan pemeliharaan rutin peralatan kantor   | Terciptanya pengelolaan sarana & prasarana  |



|     |   |                                |   |  |   |
|-----|---|--------------------------------|---|--|---|
|     |   |                                |   |  | operasional kantor  |
| 12. | Pendidikan dan pelatihan formal   | Dana sebesar Rp. 100.000.000   | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah  | Persentase sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah                         | Meningkatkan kompetensi, profesionalisme serta akuntabilitas sumber daya aparatur                 |
| 13. | Rapat koordinasi dan pengendalian (RAKORDAL)                                  | Dana sebesar Rp. 124.200.000   | 1) Frekuensi pelaksanaan RAKORDA.<br>2) Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan RAKORDAL  | Persentase rata-rata capaian realisasi fisik & keuangan OPD                              | Terwujudnya efisiensi & efektifitas serapan APBD  |
| 14. | Monitoring, evaluasi, pengendalian & pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah | Dana sebesar Rp. 1.342.800.000 | 1) Jumlah personil tim monitoring percepatan pembangunan Kab. Tana Tidung.<br>2) Frekuensi kegiatan rapat tim monitoring percepatan pembangunan Kab. Tana Tidung.<br>3) Frekuensi monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kab. Tana Tidung. | Terlaksananya program-program pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan transparan | Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas serta percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah |
| 15. | Pengolahan, updating, dan analisa data dan statistik daerah                   | Dana sebesar Rp. 203.600.000   | 1) Jumlah personil Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).<br>2) Frekuensi rapat TPID.<br>3) Jumlah laporan TPID  | Terlaksananya laporan proses pengawasan barang (sembako) inflasi Kab. Tana Tidung        | Terwujudnya stabilitas harga pasar  |
| 16. | Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah                              | Dana sebesar Rp. 391.300.000   | 1) Jumlah personil Tim penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK).<br>2) Jumlah laporan/buku IHK  | Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan indeks harga konsumen (IHK)                    | Terumuskannya kebijakan ekonomi bidang UKM  |

|     |                               |                                |   |   |   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 17. | Unit Layanan pengadaan (ULP)  | Dana sebesar Rp. 1.856.085.000 | 1)Jumlah personil tim ULP. 2)Jumlah personil ULP yang mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah | Persentase pelaksanaan pengadan barang dan jasa pemerintah  | Terwujudnya tata kelola pengadan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel   |
| 18. | Portal informasi berbasis Web | Dana sebesar Rp. 117.300.000   | 1)jumlah pelatihan administrator system informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD).  | 1)Tersedianya system pelaporan kinerja dan capaian realisasi fisik & keuangan yang cepat dan akurat.<br>2)Persentase efektifitas laporan berbasis Web | 1)Terwujudnya system pelaporan dan kinerja OPD yang akurat dan objektif. 2) Terciptanya proses pemantauan kegiatan yang efektif dan serapan anggaran yang optimal |

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJUN TAHUN 2020  
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

| KODE          | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2019    |                        |                               |                  | CATATAN PENTING | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 |                               | KET |
|---------------|--|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
|               |  |   | LOKASI                | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER PENDANAAN |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA    | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |     |
| 6             | 7  | 8   | 10                    | 11                     | 12                            | 13               | 14              | 15                        | 16                            | 17  |
| 4.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran |                       | 98%                    | Rp 853,887,000                |                  |                 | 98%                       | Rp 910,487,000                |     |
| 4.01.03.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah penggunaan materai                                 | Kabupaten Tana Tidung | 300 Lembar             | Rp 1,800,000                  | APBD             |                 | 400 Lembar                | Rp 2,400,000                  |     |
| 4.01.03.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah BPKB mobil dinas yang diperpanjang                 | Kabupaten Tana Tidung | 1 Unit                 | Rp 1,000,000                  | APBD             |                 | 1 Unit                    | Rp 3,000,000                  |     |
| 4.01.03.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah tenaga administrasi keuangan                       | Kabupaten Tana Tidung | 17 Orang               | Rp 251,787,000                | APBD             |                 | 17 Orang                  | Rp 251,787,000                |     |
|               |  | Frekuensi pertemuan atau rapat kerja tenaga               | Kabupaten Tana Tidung | 4 Kali                 | Rp 7,000,000                  | APBD             |                 | 4 Kali                    | Rp 8,000,000                  |     |
|               |  | Jumlah laporan PPTK                                       | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun                | Rp 1,000,000                  | APBD             |                 | 1 Tahun                   | Rp 2,000,000                  |     |
| 4.01.03.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)                      | Kabupaten Tana Tidung | 40 Jenis               | Rp 30,000,000                 | APBD             |                 | 40 Jenis                  | Rp 30,000,000                 |     |



|                   |  |  |                       |           |                |      |  |           |                |  |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------|------|--|-----------|----------------|--|
| 4.01.03.0<br>1.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah pengadaan/ cetak spanduk  | Kabupaten Tana Tidung | 20 Lembar | Rp 7,500,000   | APBD |  | 20 Lembar | Rp 9,500,000   |  |
| 4.01.03.0<br>1.22 | Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran                                    | Jumlah ketersediaan tenaga kontrak   | Kabupaten Tana Tidung | 2 Orang   | Rp 52,800,000  | APBD |  | 2 Orang   | Rp 52,800,000  |  |
| 4.01.03.0<br>1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                         | Jumlah rapat-rapat koordinasi atau kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh aparatur | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun   | Rp 400,000,000 | APBD |  | 1 Tahun   | Rp 400,000,000 |  |
| 4.01.03.0<br>1.19 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam daerah yang diikuti oleh aparatur               | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun   | Rp 100,000,000 | APBD |  | 1 Tahun   | Rp 150,000,000 |  |
|                   |  | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring   | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun   | Rp 1,000,000   | APBD |  | 1 Tahun   | Rp 1,000,000   |  |
| 4.01.03.0<br>2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                            | Prosentase peningkatan pelayanan publik Bagian Ekobang                                       |                       | 90%       | Rp 782,500,000 |      |  | 90%       | Rp 720,100,000 |  |
| 4.01.03.0<br>2.11 | Infrastruktur LPSE   | Jumlah tenaga pelaksana Tim LPSE   | Kabupaten Tana Tidung | 19 Orang  | Rp 285,500,000 | APBD |  | 19 Orang  | Rp 285,500,000 |  |
|                   |  | Jumlah kapasitas jaringan/ koneksi internet LPSE   | Kabupaten Tana Tidung | 6 Mbps    | Rp 211,000,000 | APBD |  | 6 Mbps    | Rp 211,000,000 |  |
|                   |  | Frekuensi pelatihan penyedia barang dan jasa   | Kabupaten Tana Tidung | 2 Kali    | Rp 15,000,000  | APBD |  | 2 Kali    | Rp 15,000,000  |  |
|                   |  | Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis LPSE                                | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun   | Rp 100,000,000 | APBD |  | 1 Tahun   | Rp 150,000,000 |  |
|                   |  | Jumlah pengadaan media informasi LPSE (Kalender & Stan banner)                               | Kabupaten Tana Tidung | 1 Paket   | Rp 15,000,000  | APBD |  | 1 Paket   | Rp 15,000,000  |  |



|                   |   |   |                       |          |                  |      |  |          |                  |  |
|-------------------|---|---|-----------------------|----------|------------------|------|--|----------|------------------|--|
| 4.01.03.0<br>2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                          | Jumlah jenis spare part mobil dinas yang diperbaiki                           | Kabupaten Tana Tidung | 7 Jenis  | Rp 15,000,000    | APBD |  | 7 Jenis  | Rp 20,000,000    |  |
|                   |   | Jumlah bahan bakar/ pelumas yang digunakan                                    | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 9,600,000     | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 9,600,000     |  |
|                   |   | Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 2,400,000     | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 3,000,000     |  |
| 4.01.03.0<br>2.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                              | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 9,000,000     | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 11,000,000    |  |
| 4.01.03.0<br>2.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   | Jumlah gedung yang direhab  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Paket  | Rp 120,000,000   | APBD |  | -        | Rp -             |  |
| 4.01.03.0<br>5    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              | Prosentase aparatur memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa        |                       | 60%      | Rp 415,000,000   |      |  | 90%      | Rp 150,000,000   |  |
| 4.01.03.0<br>5.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal         | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 100,000,000   | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 150,000,000   |  |
| 4.01.03.0<br>5.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Perpres PBJ)                          | Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan dan paham Perpres PBJ No.16 Tahun 2018  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Kali   | Rp 315,000,000   | APBD |  | -        | Rp -             |  |
| 4.01.03.0<br>6    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                    |                       | 90%      | Rp 1,243,424,000 |      |  | 90%      | Rp 1,258,800,000 |  |
| 4.01.03.0<br>6.19 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumah tenaga atau Tim monitoring percepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung | Kabupaten Tana Tidung | 27 Orang | Rp 930,000,000   | APBD |  | 27 Orang | Rp 930,000,000   |  |



|                   |   |   |                       |          |                  |      |  |          |                  |  |
|-------------------|---|---|-----------------------|----------|------------------|------|--|----------|------------------|--|
|                   |   | Frekuensi kegiatan rapat atau pertemuan Tim Monitorin gpercepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung | Kabupaten Tana Tidung | 2 Kali   | Rp 8,624,000     | APBD |  | 2 Kali   | Rp 24,000,000    |  |
|                   |   | Jumlah kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti aparat   | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 100,000,000   | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 100,000,000   |  |
|                   |   | Frekuensi kunjungan atau monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 80,000,000    | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 80,000,000    |  |
| 4.01.03.0<br>6.06 | RAKORDAL                                    | Frekuensi pelaksanaan kegiatan RAKORDAL   | Kabupaten Tana Tidung | 2 Kali   | Rp 105,000,000   | APBD |  | 2 Kali   | Rp 105,000,000   |  |
|                   |   | Frekuensi pelaksanaan rapat kerja   | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 18,000,000    | APBD |  | 1 Tahun  | Rp 18,000,000    |  |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan RAKORDAL   | Kabupaten Tana Tidung | 2 Kali   | Rp 1,000,000     | APBD |  | 2 Kali   | Rp 1,000,000     |  |
|                   |   | Jumlah penggunaan jasa dokumentasi  | Kabupaten Tana Tidung | 2 Kali   | Rp 800,000       | APBD |  | 2 Kali   | Rp 800,000       |  |
| 4.01.03.3<br>1    | Program Pendukung Administrasi Pemerintahan | Prosesntase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik                                 |                       | 100%     | Rp 1,805,700,000 |      |  | 100%     | Rp 1,856,000,000 |  |
| 4.01.03.3<br>1.03 | Unit Layanan Pengadaan (ULP)                | Jumlah tenaga/ panitia pengadaan barang dan jasa (ULP)  | Kabupaten Tana Tidung | 24 Orang | Rp 1,235,000,000 | APBD |  | 24 Orang | Rp 1,235,000,000 |  |
|                   |   | Jumlah penggunaan ATK (Jenis)   | Kabupaten Tana Tidung | 10 Jenis | Rp 15,000,000    | APBD |  | 10 Jenis | Rp 15,000,000    |  |



|                    |   |   |                       |                  |                       |      |  |                  |                |  |
|--------------------|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------|--|------------------|----------------|--|
|                    |   | Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti ULP                           | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 250,000,000        | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 250,000,000 |  |
|                    |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh Tim ULP | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 300,000,000        | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 350,000,000 |  |
|                    |   | Jumlah sarana penunjang administrasi ULP                                    | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 5,700,000          | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 6,000,000   |  |
| 4.03.4.01.03.15    | Program Pengembangan Data/Informasi                         | Terlaksananya kegiatan penyusunan buku Indeks Harga Konsumen (IHK)          |                       | 1 Buku           | Rp 391,300,000        |      |  | 1 Buku           | Rp 391,300,000 |  |
| 4.03.4.01.03.15.06 | Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah        | Jumlah tenaga pendataan indeks harga konsumen                               | Kabupaten Tana Tidung | 30 Orang         | Rp 306,350,000        | APBD |  | 30 Orang         | Rp 306,350,000 |  |
|                    |   | Jumlah buku atau laporan IHK  | Kabupaten Tana Tidung | 286 Buku/Dokumen | Rp 44,600,000         | APBD |  | 286 Buku/Dokumen | Rp 44,600,000  |  |
|                    |   | Jumlah Kunjungan atau monitoring ke pusat-pusat ekonomi masyarakat          | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 40,350,000         | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 40,350,000  |  |
| 2.14.4.01.03.15    | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah        | Tersusunnya laporan Inflasi Kabupaten Tana Tidung                           |                       | 100%             | Rp 163,600,000        |      |  | 100%             | Rp 163,600,000 |  |
| 2.14.4.01.03.15.02 | Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah | Jumlah tenaga pelaksana atau Tim Pengendali inflasi daerah (TPID)           | Kabupaten Tana Tidung | 23 Orang         | Rp 102,600,000        | APBD |  | 23 Orang         | Rp 102,600,000 |  |
|                    |   | Frekuensi rapat koordinasi luar daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 60,000,000         | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 60,000,000  |  |
|                    |   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan TPID                                    | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun          | Rp 1,000,000          | APBD |  | 1 Tahun          | Rp 1,000,000   |  |
| 2.10.4.01.03.20    | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi        | <b>Terlaksananya sistem pengendalian pembangunan berbasis elektronik</b>    |                       | <b>100%</b>      | <b>Rp 117,300,000</b> |      |  | <b>100%</b>      | <b>Rp -</b>    |  |



|                                |                               |   |                       |          |                         |      |  |                         |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------|------|--|-------------------------|--|--|
| 2.10 .<br>4.01.03 .<br>20 . 01 | Portal Informasi Berbasis Web | Jumlah tenaga pendamping portal informasi   | Kabupaten Tana Tidung | 23 Orang | Rp 25,000,000           | APBD |  |                         |  |  |
|                                |                               | Jumlah materi pelatihan admin SIMPPD  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 3,300,000            | APBD |  |                         |  |  |
|                                |                               | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD) | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 15,000,000           | APBD |  |                         |  |  |
|                                |                               | Jumlah seminar kit pelaksanaan pelatihan admin SIMPPD   | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 32,000,000           | APBD |  |                         |  |  |
|                                |                               | Tersedianya layanan hosting perangkat SIMPPD  | Kabupaten Tana Tidung | 1 Tahun  | Rp 42,000,000           | APBD |  |                         |  |  |
| <b>TOTAL</b>                   |                               |   |                       |          | <b>Rp 5,772,711,000</b> |      |  | <b>Rp 5,450,287,000</b> |  |  |



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2019, sehingga upaya Bagian Perekonomian dan Pembangunan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Perekonomian dan Pembangunan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan cerminan dan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 26 Maret 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**



**H. HADI ARYANTO, ST., MT**

Pembina/ IVa

NIP. 19740417 200212 1 003